

Pengaruh Upah Minimum, PDRB Per Kapita, dan Jumlah Industri terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah (2021-2025)

Sirojul Munawwar¹, Anton Bawono^{2*}, Rina Rosia³

^{1,3}Pascasarjana, Ekonomi Syariah, UIN Salatiga, Kota Salatiga, Indonesia

²Pascasarjana, Ekonomi Syariah, UIN Sunan Kalijaga, Kota Yogyakarta, Indonesia

Email: sirojulmuna17@gmail.com, ^{2*} anton.bawono@uin-suka.ac.id, ³ rinarosia@uinsalatiga.ac.id

(* : coresponding author)

Abstrak

Penyerapan tenaga kerja merupakan indikator penting dalam pembangunan ekonomi daerah karena mencerminkan kemampuan perekonomian dalam menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran. Namun, pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak selalu diikuti oleh peningkatan kesempatan kerja, sehingga memunculkan fenomena *jobless growth*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh upah minimum, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, dan jumlah industri terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah periode 2021–2025. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori dan metode data panel yang mengombinasikan data *time series* dan *cross section* pada 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan dianalisis menggunakan regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak EViews. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja ($t = 8,097975$; $p < 0,05$), sedangkan PDRB per kapita ($t = 1,568907$; $p > 0,05$) dan jumlah industri ($t = 1,034356$; $p > 0,05$) tidak berpengaruh signifikan secara parsial. Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja ($F = 51,82890$; $p < 0,05$) dengan nilai Adjusted R^2 sebesar 46,70%. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan upah minimum lebih berperan dalam mendorong penyerapan tenaga kerja dibandingkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan jumlah industri. Hasil penelitian juga mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan perkembangan industri di Jawa Tengah belum sepenuhnya bersifat inklusif terhadap penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mendorong kebijakan yang berorientasi pada pengembangan sektor padat karya, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan keterkaitan antara investasi industri dan penciptaan kesempatan kerja.

Kata Kunci: upah minimum, penyerapan tenaga kerja, PDRB per kapita, jumlah industri, Jawa Tengah

Abstract

Employment absorption is an important indicator of regional economic development as it reflects the economy's ability to create job opportunities and reduce unemployment. However, economic growth does not always lead to a proportional increase in employment, resulting in the phenomenon of *jobless growth*. This study aims to analyze the effects of minimum wage, Gross Regional Domestic Product (GRDP) per capita, and the number of industries on employment absorption in Central Java Province during the 2021–2025 period. The research employs a quantitative approach with an explanatory research design and panel data methodology, combining time-series and cross-sectional data from 35 regencies and municipalities in Central Java. Secondary data were obtained from the Central Statistics Agency and analyzed using panel data regression with EViews software. The findings reveal that the minimum wage has a positive and statistically significant effect on employment absorption ($t = 8.097975$; $p < 0.05$), while GRDP per capita ($t = 1.568907$; $p > 0.05$) and the number of industries ($t = 1.034356$; $p > 0.05$) do not have significant partial effects. Simultaneously, all independent variables significantly influence employment absorption ($F = 51.82890$; $p < 0.05$), with an Adjusted R^2 value of 46.70%. These results indicate that minimum wage policies play a more substantial role in promoting employment absorption than economic growth and industrial expansion. Furthermore, the findings suggest that economic growth and industrial development in Central Java have not yet been fully inclusive in generating employment opportunities. Therefore, local governments should implement policies that emphasize labor-intensive sector development, human capital improvement, and stronger linkages between industrial investment and job creation.

Keywords: minimum wage, employment absorption, GDRP per capita, number of industries, central java

1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi daerah merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan nasional, terutama dalam menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menekan tingkat pengangguran. Dalam perspektif ekonomi pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi idealnya diikuti oleh peningkatan kapasitas sektor-sektor produktif dalam menyerap tenaga kerja. Namun, dalam praktiknya, pertumbuhan ekonomi tidak selalu berjalan seiring dengan peningkatan kesempatan kerja. Fenomena ini dikenal sebagai *jobless growth*, yaitu kondisi ketika perekonomian mengalami pertumbuhan yang relatif tinggi, tetapi tidak mampu menciptakan lapangan kerja secara proporsional. Fenomena tersebut menjadi salah satu tantangan utama pembangunan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Provinsi Jawa Tengah yang memiliki struktur ekonomi berbasis industri pengolahan dan sektor padat karya. Kondisi ini menunjukkan adanya

ketidakseimbangan antara peningkatan output ekonomi dengan kemampuan sektor riil dalam menyerap tenaga kerja sehingga pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya bersifat inklusif terhadap pasar kerja [1].

Fenomena *jobless growth* semakin relevan untuk dikaji mengingat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren positif, tetapi masih dihadapkan pada persoalan ketenagakerjaan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2024 tumbuh sebesar 4,95 persen dengan sektor industri pengolahan sebagai kontributor terbesar terhadap struktur ekonomi daerah, yaitu sekitar 34,99 persen dari total PDRB. Meskipun demikian, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus 2024 masih tercatat sebesar 4,78 persen dengan jumlah angkatan kerja mencapai 21,91 juta orang. Data tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi belum sepenuhnya mampu menyerap tambahan angkatan kerja yang terus meningkat setiap tahun. Selain itu, perkembangan industri yang semakin mengarah pada penggunaan teknologi, digitalisasi proses produksi, dan otomatisasi berpotensi mengurangi kebutuhan tenaga kerja dalam beberapa sektor tertentu. Kondisi ini memperkuat dugaan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi cenderung lebih banyak didorong oleh peningkatan produktivitas dan investasi modal dibandingkan peningkatan penggunaan tenaga kerja [2], [3].

Selain pertumbuhan ekonomi, kebijakan upah minimum juga menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi dinamika pasar tenaga kerja. Upah minimum merupakan instrumen kebijakan yang digunakan pemerintah untuk menjamin tingkat kesejahteraan pekerja melalui standar pengupahan yang layak. Secara teoritis, peningkatan upah minimum dapat meningkatkan daya beli masyarakat serta mendorong produktivitas tenaga kerja. Namun, dari sisi perusahaan, kenaikan upah minimum dapat meningkatkan biaya produksi sehingga berpotensi menurunkan permintaan tenaga kerja, khususnya pada sektor usaha yang memiliki tingkat ketergantungan tinggi terhadap tenaga kerja. Perbedaan perspektif tersebut menyebabkan hubungan antara upah minimum dan penyerapan tenaga kerja menjadi salah satu isu yang masih diperdebatkan dalam literatur ekonomi tenaga kerja. Beberapa penelitian menemukan bahwa kenaikan upah minimum berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja karena perusahaan melakukan efisiensi tenaga kerja, sedangkan penelitian lainnya menunjukkan bahwa peningkatan upah minimum justru dapat mendorong produktivitas dan meningkatkan permintaan agregat yang pada akhirnya berdampak positif terhadap kesempatan kerja [4], [5].

Faktor lain yang turut memengaruhi penyerapan tenaga kerja adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Secara teoritis, peningkatan PDRB per kapita menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang dapat memperluas kapasitas produksi dan menciptakan peluang kerja baru. Akan tetapi, peningkatan PDRB tidak selalu diikuti oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja apabila pertumbuhan tersebut lebih banyak berasal dari sektor-sektor yang bersifat padat modal. Dalam kondisi demikian, peningkatan output ekonomi lebih banyak dihasilkan melalui penggunaan teknologi dan investasi modal dibandingkan penambahan tenaga kerja. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan pengangguran maupun peningkatan kesempatan kerja. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kualitas pertumbuhan ekonomi menjadi faktor yang sama pentingnya dengan besarnya pertumbuhan ekonomi itu sendiri dalam menentukan kemampuan suatu daerah menyerap tenaga kerja [6].

Selain upah minimum dan PDRB per kapita, jumlah industri yang beroperasi di suatu wilayah juga memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja. Teori pembangunan industri menjelaskan bahwa peningkatan jumlah unit usaha industri akan memperluas aktivitas produksi sehingga meningkatkan kebutuhan terhadap tenaga kerja. Dalam konteks Jawa Tengah, sektor industri pengolahan menjadi salah satu sektor unggulan yang berkontribusi besar terhadap pembentukan PDRB daerah. Kehadiran kawasan industri baru, meningkatnya investasi manufaktur, serta relokasi industri dari wilayah lain menjadikan Jawa Tengah sebagai salah satu pusat pertumbuhan industri nasional. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa jumlah industri memiliki pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, khususnya pada sektor manufaktur dan industri pengolahan [7]. Namun demikian, perkembangan industri modern yang semakin mengadopsi teknologi otomatisasi dan digitalisasi produksi menyebabkan hubungan antara jumlah industri dan penyerapan tenaga kerja menjadi lebih kompleks karena peningkatan jumlah industri tidak selalu diikuti oleh peningkatan kebutuhan tenaga kerja dalam jumlah yang sama.

Dalam konteks regional, Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia sekaligus daerah tujuan investasi industri yang terus berkembang. Posisi strategis tersebut menjadikan Jawa Tengah sebagai wilayah yang memiliki potensi besar dalam menciptakan kesempatan kerja melalui pengembangan sektor industri dan sektor produktif lainnya. Akan tetapi, tingginya jumlah angkatan kerja, ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri, serta masih besarnya proporsi pekerja informal menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Kondisi pascapandemi COVID-19 juga



menyebabkan terjadinya perubahan struktur pasar tenaga kerja, termasuk meningkatnya penggunaan teknologi digital, perubahan pola produksi, serta pergeseran kebutuhan keterampilan tenaga kerja. Oleh karena itu, analisis mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah menjadi semakin penting untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan kondisi ekonomi terkini.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji hubungan antara upah minimum, pertumbuhan ekonomi, dan penyerapan tenaga kerja, namun hasil yang diperoleh masih menunjukkan inkonsistensi. Sebagian penelitian menemukan bahwa upah minimum berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja karena meningkatkan biaya produksi perusahaan, sementara penelitian lainnya menunjukkan pengaruh positif atau bahkan tidak signifikan. Hal serupa juga ditemukan pada variabel PDRB yang dalam beberapa studi terbukti mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja, tetapi dalam penelitian lain menunjukkan pengaruh yang lemah akibat dominasi sektor-sektor padat modal dalam struktur ekonomi daerah [6]. Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan cakupan data nasional atau lintas provinsi sehingga belum mampu menggambarkan secara spesifik karakteristik ketenagakerjaan di Jawa Tengah yang memiliki struktur ekonomi dan karakteristik industri yang berbeda dibandingkan daerah lain. Di sisi lain, variabel jumlah industri masih relatif jarang dianalisis secara simultan bersama variabel upah minimum dan PDRB per kapita dalam satu model empiris yang terintegrasi.

Kesenjangan penelitian (*research gap*) juga terlihat dari aspek temporal penelitian. Sebagian besar studi terdahulu masih menggunakan periode pengamatan sebelum pandemi atau hanya mencakup fase awal pemulihan ekonomi pascapandemi. Padahal, pandemi COVID-19 telah menyebabkan perubahan signifikan terhadap struktur ekonomi dan pasar tenaga kerja, termasuk percepatan digitalisasi industri, perubahan pola investasi, serta transformasi kebutuhan tenaga kerja. Oleh karena itu, penggunaan data periode 2021–2025 menjadi penting karena mampu merepresentasikan kondisi pemulihan ekonomi dan dinamika ketenagakerjaan yang lebih aktual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh upah minimum, PDRB per kapita, dan jumlah industri terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah selama periode 2021–2025. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur ekonomi pembangunan dan ekonomi tenaga kerja terkait hubungan antara variabel makroekonomi dan penyerapan tenaga kerja pada tingkat regional. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih efektif, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta mengoptimalkan pengembangan sektor industri sebagai sumber penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori (*explanatory research*) yang bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen berupa upah minimum, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, dan jumlah industri terhadap variabel dependen yaitu penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2021–2025. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengukuran hubungan antarvariabel secara objektif melalui analisis statistik, sedangkan penelitian eksplanatori digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara variabel independen dan variabel dependen berdasarkan teori ekonomi pembangunan dan ekonomi tenaga kerja. Desain penelitian yang digunakan adalah desain kausalitas dengan pendekatan data panel (*panel data*), yaitu kombinasi antara data *time series* (tahun 2021–2025) dan data *cross section* (35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah) [9]. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 35 wilayah administratif, terdiri atas 29 kabupaten dan 6 kota. Teknik penentuan sampel menggunakan metode sampel jenuh (*saturated sampling*) atau sensus, sehingga seluruh anggota populasi dijadikan sampel penelitian. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari instansi resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, mencatat, mengolah, dan mengklasifikasikan data yang diperoleh dari laporan statistik resmi, publikasi tahunan, serta dokumen pemerintah yang relevan dengan penelitian. Instrumen penelitian berupa lembar dokumentasi dan format tabulasi data yang disusun berdasarkan variabel penelitian. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penyerapan tenaga kerja (Y), yang diukur menggunakan jumlah penduduk bekerja pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dengan satuan jiwa. Penyerapan tenaga kerja dipilih sebagai indikator utama karena mencerminkan kemampuan perekonomian daerah dalam menyediakan kesempatan kerja bagi masyarakat. Variabel independen pertama adalah upah minimum kabupaten/kota (X_1), yang diukur berdasarkan nilai UMK tahunan dalam satuan rupiah. Variabel ini digunakan untuk menggambarkan kebijakan pengupahan yang berlaku di setiap daerah. Variabel independen kedua adalah Produk Domestik Regional Bruto per kapita (X_2), yang diukur menggunakan nilai PDRB per kapita atas dasar harga konstan dalam satuan rupiah per tahun. Penggunaan harga konstan bertujuan untuk menghilangkan pengaruh inflasi sehingga lebih mencerminkan pertumbuhan ekonomi riil. Variabel independen ketiga adalah jumlah industri (X_3), yang diukur berdasarkan

jumlah unit usaha industri yang beroperasi pada masing-masing kabupaten/kota. Variabel ini digunakan untuk merepresentasikan perkembangan sektor industri sebagai salah satu sektor utama penyerap tenaga kerja [10].

Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak EVIEWS karena memiliki kemampuan yang kuat dalam mengolah data panel, melakukan pengujian model ekonometrika, serta menyediakan berbagai prosedur estimasi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian kuantitatif. Selain itu, penggunaan EVIEWS juga banyak diterapkan dalam penelitian ekonomi regional dan ketenagakerjaan sehingga dapat meningkatkan validitas metodologis penelitian. Hasil estimasi kemudian dianalisis melalui uji t untuk mengetahui pengaruh parsial masing-masing variabel independen terhadap penyerapan tenaga kerja, uji F untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen, serta koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi penyerapan tenaga kerja. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 5% ($\alpha = 0,05$), sehingga hasil analisis diharapkan mampu memberikan kesimpulan empiris yang valid, reliabel, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan terkait peningkatan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah [11].

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Variabel upah minimum memiliki nilai t hitung sebesar $8,097975 > t$ tabel $1,973771337$ dengan nilai prob. sebesar $0,0000 < 0,05$. Dengan hasil tersebut, dapat dikatakan bahwa upah minimum mempengaruhi banyaknya tenaga kerja terserap di provinsi Jawa Tengah secara positif dan signifikan. Hasil ini sejalan dengan penelitian oleh [12], [13], [14] yang memberikan hasil serupa bahwa upah minimum berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Penelitian yang dilakukan oleh [15], [16], [17] memberikan hasil yang berbeda bahwasanya variabel upah minimum tidak memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.

Kenaikan tingkat upah akan berdampak besar pada tingkat produktivitas pekerja. Sejalan dengan pendapat Keynes yang memaparkan jika upah yang lebih tinggi akan meningkatkan pendapatan pekerja, yang selanjutnya meningkatkan daya beli dan konsumsi. Ketika konsumsi meningkat, permintaan terhadap produk yang dihasilkan juga akan bertambah. Oleh karena itu, produsen harus meningkatkan skala produksi dengan menambah jumlah pekerja sebagai input produksi. Penelitian ini memberikan kontribusi untuk memahami peran penting upah minimum dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah. Implikasinya tidak hanya mencakup peningkatan kesejahteraan pekerja, tetapi juga berpotensi untuk mendukung efisiensi ekonomi di tingkat regional. Hal ini menjadi relevan dan berharga dalam konteks perencanaan kebijakan ketenagakerjaan dan pembangunan ekonomi di wilayah tersebut. Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu terus meningkatkan kesadaran akan pentingnya upah minimum sebagai instrumen kebijakan yang dapat mendukung penyerapan tenaga kerja.

Pengaruh PDRB Perkapita terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Variabel PDRB perkapita sebagai variabel independen lainnya sesuai dengan hasil pengujian tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, ditandai dengan nilai t hitung $1,568907 < t$ tabel $1,973771337$ dan nilai Prob lebih dari alpha ($0,05$) yaitu $0,1185$. Hasil ini sejalan dengan penelitian [18], [19], [20] bahwa peningkatan PDRB suatu wilayah mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja meskipun secara tidak signifikan. Harrod-Domar mengemukakan teori pertumbuhan ekonomi yang mensyaratkan penggunaan barang-barang modal dengan tujuan perekonomian meraih pertumbuhan yang kuat (*steady growth*). Pengadaan barang modal dapat menstimulasi perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa. Barang modal tersebut akan meningkatkan produktivitas industri sehingga harus diseimbangkan dengan penyerapan tenaga kerja untuk menghindari *Law of Diminishing Return*. Sehingga wajar apabila kenaikan PDRB dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Meskipun dalam penelitian ini pengaruhnya diketahui tidak signifikan.

Menurut [18], fenomena seperti ini mungkin terjadi karena Jawa Tengah memiliki 35 Kabupaten/Kota yang corak perekonomiannya beragam, sehingga pengaruh kenaikan PDRB tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Penelitian ini juga memberikan pemahaman bahwa pengaruh kenaikan PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah mungkin tidak konsisten dan signifikan disebabkan oleh banyaknya sektor ekonomi di 35 Kabupaten/Kota di wilayah tersebut. Meskipun konsep dasar bahwa pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja masih relevan, namun perbedaan struktur ekonomi antar wilayah dapat mendorong pengaruhnya. Sebagai hasilnya, peningkatan PDRB tidak selalu berdampak signifikan pada penyerapan tenaga kerja di semua wilayah Jawa Tengah. Kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan sebaiknya mempertimbangkan keberagaman ekonomi di wilayah 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Penyesuaian kebijakan yang lebih terlokalisasi dan responsif terhadap kondisi ekonomi setempat dapat meningkatkan dampak positif pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja.

Pengaruh Jumlah Industri Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Variabel jumlah industri sebagai variabel independen lainnya sesuai dengan hasil pengujian tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, ditandai dengan nilai t hitung $1,034356 < t$ tabel $1,973771337$ dan nilai Prob lebih dari alpha ($0,05$) yaitu $0,3024$. Hasil ini sejalan dengan penelitian [21], [22] bahwa peningkatan jumlah industri di suatu wilayah mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja meskipun secara tidak signifikan.

Sifat industri yang berbeda-beda menghasilkan penyerapan tenaga kerja tidak terpengaruh dengan banyak atau sedikitnya keberadaan dikarenakan tanpa jumlah industri sudah penyerapan tenaga meskipun di wilayah penambahan jumlah tersebut tidak penyerapan jumlah tersebut sudah menjadi sistem otomatis jika industri bertambah maka akan menyerap tenaga kerja secara tidak langsung.

Correlated Random Effects - Hausman Test
 Equation: Untitled
 Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.639802	3	0.6504

jumlah industri. Hal ini adanya penambahan bisa meningkatkan kerja. Dengan demikian jawa tengah terjadi industri, maka hal berpengaruh terhadap pekerja. Karena hal tenaga kerja secara tidak

4. PENGUJIAN

Uji Pemilihan Model (Chow)

Uji chow dilakukan untuk membandingkan atau memilih mana yang terbaik antara common effect model atau fixed effect model. Pengambilan keputusan dengan melihat nilai probabilitas untuk cross-section. Jika nilai $p > 0,05$ maka model yang terpilih adalah common effect model. Namun jika $p < 0,05$ maka model yang terpilih adalah fixed effect model.

Gambar 1. Hasil Uji Chow

Sumber: Output Eviews 13

Berdasarkan hasil uji chow didapatkan Nilai Prob. Cross-section Chi-square sebesar $0,000 < 0,5$ maka model yang terpilih adalah Fixed Effect Model. Dengan demikian pemilihan model dilanjutkan dengan uji Hausman.

Uji Pemilihan Model (Hausman)

Uji ini dilakukan untuk membandingkan atau memilih mana model yang terbaik antara fixed effect model dan random effect model. Pengambilan keputusan dengan melihat nilai probabilitas untuk cross-section random. Jika nilai $p > 0,05$ maka model yang terpilih adalah random effect model, namun jika $p < 0,05$ maka model yang terpilih fixed effect model.

Gambar 2. Hasil Uji

Redundant Fixed Effects Tests
 Equation: Untitled
 Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	21.058522	(34,137)	0.0000
Cross-section Chi-square	320.034157	34	0.0000

Hausman

Sumber: Output Eviews 13

Berdasarkan hasil uji hausman didapatkan Nilai Prob. Cross-section random sebesar $0,6504 > 0,5$ maka model yang terpilih adalah Random Effect Model. Dengan terpilihnya model tersebut maka dilanjutkan dengan uji lagrange multiplier.

Uji Pemilihan Model (Lagrange Multiplier)

Uji ini merupakan uji terakhir dalam pemilihan model data panel dimana memilih model terbaik yang digunakan antara random effect model. model yang terpilih < 0,05 maka model

Correlation			
	X1	X2	X3
X1	1.000000	0.540955	0.032000
X2	0.540955	1.000000	-0.184979
X3	0.032000	-0.184979	1.000000

common effect model atau Jika nilai prob > 0,05 maka CEM, sedangkan jika nilai prob terpilih yaitu REM.

Gambar 3. Hasil Uji

Lagrange Multiplier

Berdasarkan uji Breusch-Pagan Cross- < 0,5 maka model yang Dengan demikian, chow, uji hausman, dan multiplier diatas maka dalam penelitian ini

Uji Asumsi Klasik

Pada penelitian yaitu Random Effect beberapa pendapat terpilih yaitu REM melakukan uji asumsi klasik normalitas dan heteroskedastisitas, karena menggunakan metode pendekatan *Generalized Least Square* (GLS). Namun pada penelitian ini penulis mencantumkan salah satu uji asumsi klasik yaitu uji multikolinearitas.

Sumber: Output Eviews 13

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects			
Null hypotheses: No effects			
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives			
	Cross-section	Test Hypothesis Time	Both
Breusch-Pagan	220.7620 (0.0000)	0.865781 (0.3521)	221.6278 (0.0000)
Honda	14.85806 (0.0000)	-0.930473 (0.8239)	9.848292 (0.0000)
King-Wu	14.85806 (0.0000)	-0.930473 (0.8239)	3.940452 (0.0000)
Standardized Honda	15.72061 (0.0000)	-0.623898 (0.7337)	6.707624 (0.0000)
Standardized King-Wu	15.72061 (0.0000)	-0.623898 (0.7337)	1.661740 (0.0483)

diatas didapatkan section sebesar 0,0000 terpilih adalah REM. berdasarkan hasil uji uji langrange model yang terbaik yaitu REM.

ini model yang terpilih Model. Menurut bahwa jika model yang maka tidak harus

Uji Multikolinearitas

Uji ini mempunyai tujuan untuk melihat korelasi antar variabel bebas atau independen dalam satu penelitian. Pada penelitian ini menggunakan metode pengujian correlation matriks, dimana dilihat dari nilai hubungan antar variabel bebas yang tidak lebih dari 0,8.

Gambar 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Sumber: Output Eviews 13

Pada pengujian kali ini menggunakan 3 variabel independen yaitu upah minimum, pdrb per kapita, dan jumlah inustri. Berdasarkan uji diatas diperoleh nilai korelasi variabel X1 dan X2 sebesar 0,540955 < 0,80 , korelasi X1 dan X3 sebesar 0,032000 < 0,80 , dan korelasi X2 dan X3 sebesar -0,184979 < 0,80. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa korelasi antara variabel independen tidak mengalami gejala multikolinearitas.

Uji Hipotesis

Uji t (Parsial)

Uji statistik yang menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai t hitung $> t$ tabel atau $\text{sig} < 0,05$ maka H_0 ditolak, H_1 diterima yang berarti adanya pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y . Sedangkan Jika nilai t hitung $< t$ tabel atau $\text{sig} > 0,05$ maka H_1 ditolak, H_0 diterima yang berarti tidak ada pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y .

Gambar 5. Hasil Uji t

melalui	Dependent Variable: Y Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 05/30/26 Time: 14:29 Sample: 2021 2025 Periods included: 5 Cross-sections included: 35 Total panel (balanced) observations: 175 Swamy and Arora estimator of component variances					Sumber: Output Eviews 13 Menghitung t tabel excel
	Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	
	C	-258928.7	31160.91	-8.309408	0.0000	
	X1	0.137932	0.017033	8.097975	0.0000	
	X2	0.496815	0.316663	1.568907	0.1185	
	X3	0.662305	0.640307	1.034356	0.3024	

$=\text{TINV}(\text{Probability}; \text{deg_freedom})$

Ket:

Probability= 0,05

Deg_freedom= sampel-2 (175-2=173)

t tabel diperoleh angka sebesar 1,973771337.

Variabel X1 mempunyai nilai t hitung sebesar 8,097975 $> t$ tabel 1,973771337 dengan nilai probability 0,000 $< 0,05$ yang berarti adanya pengaruh positif signifikan antara variabel X1 terhadap Y .

Variabel X2 mempunyai nilai t hitung sebesar 1,568907 $< t$ tabel 1,973771337 dengan nilai probability 0,1185 $> 0,05$ yang berarti tidak ada pengaruh antara variabel X2 terhadap Y .

Variabel X3 mempunyai nilai t hitung sebesar 1,034356 $< t$ tabel 1,973771337 dengan nilai probability 0,3024 $> 0,05$ yang berarti tidak ada pengaruh antara variabel X3 terhadap Y .

Uji F (Simultan)

Uji ini dilakukan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Jika nilai F hitung $> F$ tabel atau nilai $\text{sig} < 0,05$ maka H_0 ditolak, H_1 diterima yang berarti terdapat pengaruh secara simultan antara variabel X terhadap variabel Y . Sedangkan Jika nilai F hitung $< F$ tabel atau nilai $\text{sig} > 0,05$ maka H_1 ditolak, H_0 diterima yang berarti tidak ada pengaruh secara simultan antara variabel X terhadap variabel Y .



Gambar 6. Hasil Uji F

Sumber: Output Eviews 13

F	tabel	R-squared	0.476242	Mean dependent var	15275.14	Menghitung (excel)
		Adjusted R-squared	0.467053	S.D. dependent var	36268.73	
		S.E. of regression	26477.33	Sum squared resid	1.20E+11	
		F-statistic	51.82890	Durbin-Watson stat	0.982901	
		Prob(F-statistic)	0.000000			

=F.INV.RT(probability;deg_freedom1;deg_freedom2)

Ket:

Probability= 0,05

Deg_freedom1= jumlah variabel-1 (4-1:3)

Deg_freedom2= jumlah sampel-jumlah variabel (175-4=171)

F tabel diperoleh angka sebesar 2,657449

Dapat ditarik Kesimpulan bahwa f hitung sebesar 51,82890 > f tabel 2,657449 dengan nilai prob statistic 0,000 < 0,05 yang artinya H0 ditolak dan H1 diterima berarti variabel independen yaitu upah minimum, pdrb per kapita dan jumlah industri berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen yaitu penyerapan tenaga kerja.

Koefisien Determinasi (R²)

Uji ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen.

Gambar 7. Hasil Uji R²

R-squared	0.476242	Mean dependent var	15275.14
Adjusted R-squared	0.467053	S.D. dependent var	36268.73
S.E. of regression	26477.33	Sum squared resid	1.20E+11
F-statistic	51.82890	Durbin-Watson stat	0.982901
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber:
Output Eviews
13

Berdasarkan hasil uji diatas menunjukkan nilai Adjusted R-square sebesar 0,467053 atau 46,70%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independent yang terdiri dari upah minimum, pdrb perkapita, dan jumlah industri mampu menjelaskan variabel penyerapan tenaga kerja sebesar 46,70%. Sedangkan sisanya 53,30% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

Persamaan Regresi Data Panel

Estimation Command:

=====

LS(?, CX=R) Y C X1 X2 X3

Estimation Equation:

=====

Y = C(1) + C(2)*X1 + C(3)*X2 + C(4)*X3 + [CX=R]

Substituted Coefficients:

=====

Y = -258928.697145 + 0.137932216542*X1 + 0.496814679724*X2 + 0.662305052676*X3 + [CX=R]

Y= Penyerapan Tenaga Kerja

X1= Upah Minimum

X2= PDRB Perkapita

X3= Jumlah Industri

Konstanta (-258928.697145)

Jika upah minimum, PDRB perkapita, dan Jumlah Industri bernilai 0, maka Penyerapan tenaga kerja diperkirakan sebesar -258928.697145. Hal ini adalah nilai dasar penyerapan tenaga kerja sebelum mempertimbangkan pengaruh dari variabel upah minimum, PDRB perkapita, dan Jumlah Industri.

Koefisien X1 (0.137932216542)

Setiap kenaikan 1 pada upah minimum akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 0.137932216542 dengan asumsi variabel lainnya tetap. Hal ini menunjukkan bahwa upah minimum memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja, dimana semakin tinggi upah minimum maka penyerapan tenaga kerja meningkat.

Koefisien X2 (0.496814679724)

Setiap kenaikan 1 pada PDRB perkapita akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 0.496814679724 dengan asumsi variabel lainnya tetap. Hal ini menunjukkan bahwa PDRB perkapita memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja, dimana semakin tinggi PDRB perkapita suatu daerah maka penyerapan tenaga kerja meningkat.

Koefisien X3 (0.662305052676)

Setiap kenaikan 1 pada jumlah industri akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 0.662305052676 dengan asumsi variabel lainnya tetap. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah industri memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja, dimana semakin banyak jumlah industri di suatu daerah maka penyerapan tenaga kerja meningkat.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2021–2025, dapat disimpulkan bahwa upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan PDRB per kapita dan jumlah industri tidak berpengaruh signifikan secara parsial. Namun, secara simultan ketiga variabel terbukti berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, yang menunjukkan bahwa dinamika ketenagakerjaan tidak hanya ditentukan oleh satu faktor ekonomi saja. Temuan ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan perkembangan industri di Jawa Tengah belum sepenuhnya mampu menciptakan lapangan kerja secara optimal sehingga masih mencerminkan fenomena *jobless growth*. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mendorong kebijakan pembangunan yang lebih berorientasi pada penciptaan lapangan kerja melalui penguatan sektor padat karya, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penyelarasan kebijakan upah dengan produktivitas tenaga kerja. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menambahkan variabel investasi, tingkat pendidikan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), inflasi, produktivitas tenaga kerja, dan teknologi guna memperoleh model yang lebih komprehensif dalam menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] C. M. N. Kurniawan and M. A. Samsuddin, "Pengaruh Upah Minimum dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Perkotaan di Indonesia," *J. Ekon. Manaj. Dan Bisnis*, vol. 2, no. 6, pp. 300–310, 2025, doi: <https://doi.org/10.62017/jemb>.
- [2] B. P. Statistik, "Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah Agustus 2024," Badan Pusat Statistik. Accessed: May 30, 2026. [Online]. Available: <https://magelangkota.bps.go.id/id/pressrelease/2024/11/05/164/keadaan-ketenagakerjaan-provinsi-jawa-tengah-agustus-2024.html>
- [3] B. P. Statistik, "Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Triwulan IV-2024," Badan Pusat Statistik. Accessed: May 30, 2026. [Online]. Available: <https://klatenkab.bps.go.id/en/pressrelease/2025/02/05/1401/pertumbuhan-ekonomi-jawa-tengah-triwulan-iv-2024.html>
- [4] F. R. Jaelani and N. Hasya, "Pengaruh Tingkat Upah Minimum dan Inflasi Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja di Indonesia Tahun

Sirojul Munawwar, Anton Bawono, Rina Rosia | Pengaruh Upah Minimum, PDRB Per Kapita, dan

Jumlah Industri terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah (2021-2025) | Page 557



- 2014 - 2024," *JIEP J. Ilmu Ekon. dan Pembang.*, vol. 8, no. 2, pp. 2800–289, 2025, doi: 10.20527/jiep.v8i2.2656.
- [5] L. Susilowati and D. Wahyuni, "Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Bidang Industri di Indonesia," *Equilib. J. Ekon.*, vol. 15, no. 2, pp. 222–230, 2019, doi: 10.30742/equilibrium.v15i2.699.
- [6] S. A. N. Iksan, Z. Arifin, and M. S. W. Suliswanto, "Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Investasi, dan PDRB terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia," *J. Ilmu Ekon.*, vol. 4, no. 1, pp. 42–55, 2020, doi: 10.22219/jie.v4i1.9482.
- [7] A. Widyaningrum and S. Bintariningtyas, "Pengaruh Upah Minimum, PDRB dan Jumlah Industri Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Karesidenan Madiun pada Tahun 2017-2020," *EKOMAKS J. Ilmu Ekon. Manaj. dan Akunt.*, vol. 10, no. 2, pp. 67–74, 2021, doi: 10.33319/jeko.v10i2.90.
- [8] J. J. Pingkan, "Analisis Pengaruh Upah Minimum, Inflasi, dan Tenaga Kerja Formal terhadap Produk Domestik Regional Bruto: Studi Panel Data Provinsi di Indonesia (2018-2024)," *JIEP J. Ilmu Ekon. dan Pembang.*, vol. 8, no. 2, pp. 316–325, 2025, doi: 10.20527/jiep.v8i2.2725.
- [9] S. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 2nd ed. Yogyakarta: ALFABETA, 2023.
- [10] M. Darwin et al., *Metode Penelitian Kuantitatif*, 1st ed. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- [11] K. Abdullah et al., *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, 1st ed. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021. [Online]. Available: <https://z-library.sk/book/27110479/d180ce>
- [12] F. S. A. Nugroho, "Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, Angkatan Kerja, Dan Unit Usaha Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Pengolahan Di Provinsi Jawa Timur Periode 2015-2019," *J. Ilm. Mhs. FEB*, vol. 1, no. 1, pp. 1–13, 2021, [Online]. Available: <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7753>
- [13] E. A. Hafiz and R. Haryatiningsih, "Pengaruh PDRB, UMK, IPM terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota Jawa Barat 2010-2020," *J. Ris. Ilmu Ekon.*, vol. 1, no. 1, pp. 55–65, 2021, doi: 10.29313/jrieb.v1i1.17.
- [14] R. Z. Salsabilla and T. S. Aji, "Pengaruh PDRB, Upah Minimum, Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur," *Indep. J. Econ.*, vol. 5, no. 2, pp. 127–136, 2025, doi: 10.26740/independent.v5i2.72567.
- [15] D. M. Sabihi, A. G. Kumenaung, and A. O. Niode, "Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Manado," *J. Berk. Ilm. Efisiensi*, vol. 21, no. 1, pp. 25–36, 2021.
- [16] S. S. Ummah and A. Yasin, "The Relationship of Minimum Wage, Investment, Gdrp, and Technology Index on Indonesian Labor Absorption," *J. Ilmu Ekon. Terap.*, vol. 6, no. 1, pp. 82–96, 2021, doi: 10.20473/jiet.v6i1.26553.
- [17] R. M. Pambagyo, S. Mukhtar, and A. Pratama, "Pengaruh Upah Minimum, Inflasi, dan PDRB terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa," *ULIL ALBAB J. Ilm. Multidisiplin*, vol. 3, no. 2, pp. 521–535, 2024, doi: 10.56799/jim.v3i2.2900.
- [18] A. P. Madhani, M. Muchtar, and P. R. Sihombing, "Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Timur: Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Jumlah Unit Industri, dan Konsumsi Tembakau," *J. Bayesian J. Ilm. Stat. dan Ekon.*, vol. 4, no. 1, pp. 20–32, 2024, doi: 10.46306/bay.v4i1.72.
- [19] P. E. N. Widodo and N. Woyanti, "Determinan Penyerapan Tenaga Kerja Industri Manufaktur Besar dan Sedang Jawa Timur," *Ekopem J. Ekon. Pembang.*, vol. 5, no. 1, pp. 66–78, 2023, doi: 10.32938/jep.v5i1.3957.
- [20] I. G. A. Indradewa and K. S. Natha, "Pengaruh Inflasi, PDRB, dan Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Bali," *E-Jurnal Ekon. Pembang. Univ. Udayana*, vol. 4, no. 8, pp. 923–950, 2015, [Online]. Available: <https://media.neliti.com/media/publications/44563-ID-pengaruh-inflasi-pdrb-dan-upah-minimum-terhadap-penyerapan-tenaga-kerja-di-provi.pdf>
- [21] N. H. Putri and S. Shofwan, "Pengaruh Upah Minimum, Pendidikan, dan Jumlah Industri Terhadap Penyerapan Tenaga kerja di Kabupaten Gresik Tahun 2015-2019," *J. Ilm. Mhs. FEB*, vol. 1, no. 1, pp. 1–10, 2022.
- [22] R. P. Melrin and P. Penangsang, "Analisis Pengaruh Jumlah Industri Kecil, Jumlah Penduduk, dan Angka Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Surabaya," *J. Nirta Stud. Inov.*, vol. 5, no. 1, pp. 210–218, 2025, doi: 10.61412/jnsi.v5i1.225.